

EFEKTIFITAS PENINGKATAN PELAYANAN POLRI DI POS KEPOLISIAN DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA

(Hasil penelitian tahun 2006)

1. Latar Belakang

a. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan lautan yang luasnya diperkirakan sekitar 81% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki panjang pantai 80.791 km² termasuk Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 7,7 juta km². Berdasarkan kondisi geografi tersebut, maka Indonesia memiliki batas laut dengan 10 negara yaitu Australia, India, Timor Leste, PNG, Singapura, Vietnam, Malaysia, Palau, Philipina dan Thailand. Sedangkan wilayah darat berbatasan dengan tiga negara yaitu Timor Leste, Malaysia dan PNG.

b. Wilayah perbatasan yang mempunyai posisi strategis bagi eksistensi bangsa lain dan negara adalah wilayah yang secara geografis berbatasan langsung (perbatasan darat) dan berhadapan langsung (perbatasan laut) dengan negara lain. Dengan karakteristik geografi seperti ini maka persoalan perbatasan yang sering timbul seperti masalah penetapan/perselisihan tapal batas antar negara yang tidak jelas dan selalu bergeser, penyelundupan manusia/barang, illegal logging, illegal fishing, TKI illegal, pelanggaran keimigrasian, pencurian kekayaan negara dan sebagainya selalu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program kebijakan antara lain sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.25 th 2000 mengenai program pembangunan nasional 2000-2004 Bab IX bahwa program daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.

c. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 13 menyebutkan " Tugas pokok kepolisian negara RI adalah

:a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Substansi pokok dari tujuan pengamanan di wilayah perbatasan adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta ketentraman di wilayah perbatasan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Berdasarkan surat keputusan kapolri No. Pol : Skep/812/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 tentang strategi pengembangan wilayah perbatasan tahun 2004-2006 telah ditetapkan sebanyak 10 Polda perbatasan yang dapat dibedakan menjadi dua tipologi perbatasan yaitu wilayah yang berbatasan darat (berbatasan langsung) meliputi Polda Kalimantan Barat, Kaltim, Papua, NTT, dan wilayah yang berbatasan laut (berhadapan dengan negara lain) meliputi Polda Riau, Sulut, Maluku, NAD, Sumut, dan Malut.

d. Perubahan paradigma polri sebagai langkah yang diambil untuk merespon berbagai masalah yang dihadapi yaitu membangun organisasi kepolisian yang sesuai dengan tuntutan reformasi nasional menuju polisi sipil (civilian police) yang profesional, mandiri, menjunjung tinggi HAM yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Tahun 2005 Polri telah menetapkan 3 (tiga) agenda penting yaitu 1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 2. Mempercepat penegakkan hukum atas semua pelanggaran hukum yang tergolong pada 4 (empat) jenis kejahatan dan 3. Bersama seluruh komponen bangsa yang memelihara dan mewujudkan keamanan dalam negeri. Pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur yang dikedepankan dalam setiap pelaksanaan tugas Polri termasuk bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat maupun

penegakkan hukum. Penelitian tentang efektifitas peningkatan pelayanan polri di pos kepolisian daerah perbatasan antar negara menjadi sangat penting, yakni untuk melihat sejauh mana peningkatan pelayanan polri di pos kepolisian daerah perbatasan, dan apakah permasalahannya?

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Melakukan pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisa tentang efektifitas peningkatan pelayanan Polri di pos Kepolisian daerah perbatasan antar negara.

b. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa data dan informasi hasil evaluasi guna merumuskan pembangunan pos kepolisian yang ideal dalam rangka efektifitas peningkatan pelayanan Polri di pos Kepolisian daerah perbatasan antar negara.

3. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisa data yaitu melalui angket (kuesioner), diskusi kelompok (FGD), wawancara mendalam (indepth interview) terhadap anggota polri (Kapolda, Karo, Direktur, Kapolres, Kabag/Kasad, Kapolsek, dan Kapospol), TNI, Kepala Dinas/Instansi terkait serta tokoh masyarakat.

b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang variabel atau indikator pelayanan Polri di daerah perbatasan. Selain itu, data-data sekunder berupa data geografi dan demografi dikumpulkan untuk mendukung data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner, dan penggunaan peta sebagai pedoman observasi. Data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan diskusi.

c. Responden penelitian dan nara sumber penelitian:

- 1) Responden penelitian terdiri dari :
 - a) Kapolres
 - b) Kapolsek
 - c) Kapospol

2) Nara sumber dalam wawancara terdiri dari :

- a) Kapolda dan pejabat utama Polda
- b) TNI (Dandim, Danramil)
- c) Pemda (Walikota, Bupati, Camat)
- d) Bea Cukai, Imigrasi, Perhubungan, dll
- e) Tokoh masyarakat/tokoh agama adat/tokoh pemuda.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah 8 (delapan) Polda yang berbatasan/berhadapan dengan negara lain yaitu Polda Kalbar (berbatasan dengan Malaysia), Polda Kaltim (berbatasan dengan Malaysia), Polda Kepri (berhadapan dengan Singapura), Polda Maluku (berhadapan dengan Filipina), Polda NAD (berhadapan dengan Malaysia, vietnam, dan Thailand), Polda NTT (berhadapan dengan Timor Leste), Polda Papua (berbatasan dengan PNG), Polda Sulawesi (berhadapan dengan Filipina).

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret s/d bulan Juni 2006, dengan lama kunjungan rata-rata 5 hari.

4. Hasil Penelitian

a. Demografi (variabel-variabel external yang pelayanan pos

1) Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah 146.807 km² atau 7,53 % dari luas wilayah Indonesia, atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Propinsi Kalimantan Barat merupakan propinsi terbesar kedua setelah Papua, Kaltim dan Kalteng. Secara geografis propinsi Kalimantan Barat terletak antara garis 2° 08' Bujur Timur sampai 114° 10' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Propinsi Kalbar, disebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), disebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalteng, disebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Kalimantan, dan disebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Selatan.

Wilayah Kalimantan Barat mempunyai 10 Wilayah Kabupaten dan 2 Kota. Sedangkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas hulu. Dari 16 pos perbatasan yang ada, bari 1 (satu) pos perbatasan yang resmi berfungsi yaitu pos lintas batas Entikong

di kabupaten Sanggau. Pos perbatasan lainnya yang akan diresmikan adalah Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam penelitian ini hanya diambil sampel beberapa pos perbatasan wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yakni Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di kecamatan Sajingan Besar dan Paloh. Panjang wilayah perbatasan kurang lebih 70 km, panjang wilayah pantai kurang lebih 90 km, mulai dari kecamatan Selakau s/d Tanjung Datok-Paloh. Jumlah penduduk kabupaten Sambas pada tahun 2004 adalah sebesar 500.108 jiwa. Dari jumlah tersebut 258.398 adalah perempuan dan 241.710 laki-laki, dengan komposisi Suku Melayu 43,11% suku Dayak 34,04%, suku China 11,60%, Suku bugis 1,28% lainnya 9,97%. Penduduk didaerah perbatasan pada umumnya suku Melayu dan suku Dayak.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kecamatan Bengkayang yang terletak di sebelah utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara Geografis, Bengkayang terletak pada $0^{\circ} 33' 00''$ Lintang Utara sampai $1^{\circ} 30' 00''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 39' 00''$ Bujur Timur sampai $110^{\circ} 10' 00''$ Bujur Timur. Secara Administratif wilayah kabupaten Bengkayang di batasi oleh kabupaten Sambas dan Singkawang di sebelah utara; Kota Landak di sebelah selatan; kabupaten laut Natuna di sebelah barat; dan kabupaten sanggau dan Serawak-Malaysia Timur di sebelah timur.

Panjang jalan yang berada di wilayah kabupaten Bengkayang adalah 1.993,45 km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut, tercatat 35,29 km merupakan jalan negara, 237,38 merupakan jalan propinsi, 844,53 merupakan jalan kabupaten dan 876,25 merupakan jalan dengan status jalan lainnya.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 km² dengan kepadatan penduduk per km rata-rata 29 jiwa. Secara Geografis,

Sanggau terletak pada $1^{\circ} 00'$ Lintang Utara sampai $1^{\circ} 06'$ Lintang Utara dan $109^{\circ} 08'$ Bujur Timur sampai $111^{\circ} 03'$ Bujur Timur. Secara Administratif, batas-batas wilayah kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut, disebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak) di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten ketapang, disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Landak dan disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sanggau mempunyai 15 kecamatan. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia Timur adalah kecamatan Entikong, yang telah mempunyai Border darat resmi RI - Malaysia. Jumlah penduduk kabupaten Sanggau pada tahun 2004 adalah sebesar 370.076 jiwa. Dari jumlah tersebut 178.278 adalah perempuan dan 191.368 laki-laki. Jika penduduk dirinci menurut kecamatan, maka jumlah penduduk yang paling besar berada di kecamatan Kapuas sebanyak 72.442 jiwa (19,57%) sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Noyan sebesar 9.588 jiwa (2,59%) dengan kepadatan penduduk per km rata-rata 29 jiwa. Penyebaran ini tidak merata antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya.

Kabupaten Sintang secara Geografis, terletak pada $1^{\circ} 05'$ Lintang Utara sampai $0^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur sampai $113^{\circ} 20'$ Bujur Timur. Secara Administratif, batas-batas wilayah kabupaten Sintang adalah di sebelah utara adalah Serawak-Malaysia Timur, di sebelah timur adalah kabupaten Melawi dan Propinsi Kalimantan Tengah, disebelah barat adalah kabupaten Sanggau, Sekadau dan Ketapang dan di sebelah timur adalah kabupaten Kapuas Hulu.

Secara keseluruhan, luas wilayah kabupaten Sintang adalah 21.635 km² kabupaten Sintang mempunyai 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 183 Desa serta 588 Dusun. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia Timur adalah kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Luas kawasan perbatasan kabupaten Sintang adalah 4.320.60 km², atau 13,39% dari luas keseluruhan Sintang. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2004

adalah sebesar 335.418 jiwa. Dari jumlah tersebut 172.173 adalah laki-laki dan perempuan 163.245 jiwa. Penyebaran penduduk tidak merata. Jika penduduk dirinci menurut kecamatan, maka jumlah penduduk yang paling besar berada di kecamatan Sintang yaitu sebanyak 51.398 atau sekitar 6,52 % jumlah penduduk kabupaten Sintang, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Binjai Hulu sebesar 10.650 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000-2004 rata-rata adalah 1,91 % pertahun.

Kabupaten Kapuas Hulu secara Geografis, terletak pada 0,5^o Lintang Utara sampai 1,4^o Lintang Selatan dan 111,40^o Bujur Timur sampai 111,10^o Bujur Timur. Secara Administratif, batas-batas wilayah kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut. Disebelah utara adalah Serawak-Malaysia Timur, di sebelah selatan adalah kabupaten Sintang di sebelah barat adalah kabupaten Sintang dan sebelah timur adalah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten terluas kedua (setelah kabupaten Sintang) di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, luas wilayah kabupaten Kapuas Hulu adalah 29.842 km², setara dengan 20,33 % dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km² kabupaten Kapuas Hulu mempunyai 23 kecamatan, 4 kelurahan dan 154 desa serta 434 dusun. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak Puring Kencana, Badau, Embaloh Hulu, Putussibau dan Batang Lupar. Jumlah penduduk di kabupaten Kapuas Hulu mencapai 209.275 jiwa yang menyebar di 23 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 29.842 km².

2) Kalimantan Timur

Propinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah 24.523.780 Ha atau sekitar 245.237,8 km². Jumlah penduduk sekitar 2.704.851 jiwa. Secara geografis Propinsi Kalimantan Timur terletak pada posisi 113^o44' BT dan - 118^o 59 BT dengan 04^o 25 LU dan 02^o25 LS.

Propinsi Kalimantan Timur terletak di perbatasan dengan negara Sabah, Malaysia (di sebelah utara); di sebelah timur

berbatasan dengan selat Makasar dan laut Sulawesi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan; dan disebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Serawak (Malaysia).

Wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia meliputi kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Nunukan. Kabupaten dengan Nunukan dengan luas wilayah 14.585.79 km² merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari 12 kabupaten/kota yang ada di propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 tahun 1999 yang secara administratif membawahi 5 kecamatan, yaitu kecamatan Krayan (luas 3.114.2 Km² terdiri dari 89 desa); Lumbis (2,656.5 Km² terdiri dari 77 desa); Sembakung (2.457.7 Km² terdiri dari 18 desa) Nunukan (5.536.14 Km² terdiri dari 25 desa, 2 desa berasal dari unit pemukiman transmigrasi); dan Sebatik (821,16 Km² terdiri dari 5 desa)

Kabupaten Malinau yang memiliki luas wilayah 42.618.20 Km² terletak di posisi 114^o 35 22 - 116^o 50 55 BT dan 1^o 21 36-4^o 10 55 LU. Batas wilayah kabupaten Malinau di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bulungan, di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Kutai Barat, Serawak dan di sebelah Utara kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk 52.419 jiwa, terdiri dari laki-laki 27.181 jiwa, perempuan 5.238 jiwa serta terdiri dari 12 kecamatan dan 106 desa. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mengakibatkan banyaknya pendatang ingin mencari pekerjaan di kabupaten Malinau.

3) Sulawesi Utara

Propinsi Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah 27.487.57 km², jumlah penduduk 2.159.552 jiwa. Secara geografis propinsi Sulawesi Utara terletak pada 0^o30' - 535 LU, dan 123^o30'-127^o 00 BT. Batas wilayah Sulawesi dan laut Zulu (Philipina), selatan berbatasan dengan Teluk Tomini barat, selat Makasar/propinsi Gorontalo timur, berbatasan dengan laut Maluku, Wilayah Sulawesi utara mempunyai 7 wilayah kabupaten dan 2 Kota.

Kabupaten Sangihe adalah kabupaten perbatasan, luas wilayah perbatasan

1.012,93 km. Wilayah kabupaten Sangihe terdiri dari 112 buah pulau, 30 buah pulau berpenghuni dan memiliki nama, 82 buah pulau tidak berpenghuni dan tidak memiliki nama, dengan luas daratan = 1.012 km² dan luas perairan ± 25.000 km². Karakteristik ini memberi petunjuk dan konsekuensi bahwa kawasan wilayah kabupaten kepulauan Sangihe dapat dikategorikan sebagai daerah Maritim, namun tidak ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memberi peluang eksploitasi kekayaan alam laut, terutama perikanan dalam jumlah yang sangat besar secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang tidak berhak (nelayan asing), dan itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam hingga saat ini.

Kabupaten Sangihe terletak pada 4° 4' 13" - 4° 33" LU dan 928" - 125° 57" Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan negara Philipina sebelah timur dengan laut Pasifik, sebelah selatan dengan laut Maluku dan sebelah barat dengan laut Sulawesi, posisi ini mengandung nilai strategis sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dari Utara. Menjadi perlintasan kapal-kapal niaga dan kapal perang dari utara ke timur selatan, dan alur perlintasan perairan dari barat ke timur dan sebaliknya jumlah penduduk kabupaten kepulauan Sangihe 194.629 jiwa, dengan mata sebagian besar hidup dalam keadaan keterbatasan ekonomi karena pengaruh kondisi faktor geografis dan lemahnya aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan.

4) Maluku Utara

Propinsi Maluku Utara mempunyai luas wilayah 140.255,32 km. Jumlah penduduk 917.558 jiwa. Secara geografis propinsi Maluku Utara terletak pada 3 LS, 3 LU, sebelah utara kota Ternate, selatan Teluk Weda, barat laut Maluku, timur teluk Buli. Jumlah pulau-pulau yang ada di wilayah propinsi Maluku Utara adalah yang dihuni 75 pulau, yang tidak dihuni 322 pulau. Jumlah keseluruhan pulau adalah 397 Pulau.

Wilayah Maluku Utara mempunyai 2 (dua) kota dan 6 (enam) wilayah kabupaten. Dari sekian wilayah kabupaten yang ada tersebut, dalam penelitian ini

hanya diambil sampel wilayah Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara.

Penduduk Maluku Utara 917.558 jiwa orang yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Situasi kehidupan penduduk pasca kerusuhan horizontal di wilayah propinsi Maluku utara sudah membaik hal ini terlihat dengan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Maluku utara untuk kembali hidup berdampingan dalam perbedaan suku, Agama dan ras dengan baik dan damai.

Propinsi Maluku Utara mempunyai luas wilayah 140.255,32 km². Jumlah penduduk 917.588 jiwa. Secara geografis Maluku Utara terletak pada 3° LS, 3° LU, 124° BT, 129° BB. Batas wilayah Maluku Utara adalah sebelah Utara Ternate, Selatan Teluk Weda, Barat Laut Maluku, Timur Teluk Buli. Jumlah pulau-pulau yang ada di wilayah propinsi Maluku Utara adalah yang dihuni 75 pulau, yang tidak dihuni 322 pulau. Jumlah keseluruhan pulau adalah 397 pulau.

Wilayah Maluku Utara mempunyai 2 kota dan 6 wilayah kabupaten. Dari sekian wilayah kabupaten yang ada tersebut, dalam penelitian ini hanya diambil sampel wilayah Maluku Utara dan kabupaten Halmahera Utara.

Penduduk Maluku Utara 917.558 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Situasi kehidupan penduduk pasca kerusuhan horizontal di wilayah Maluku Utara sudah membaik hal ini terlihat dengan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Maluku Utara untuk kembali hidup berdampingan dalam perbedaan suku, agama dan ras dengan baik dan damai.

Luas wilayah kabupaten Halmahera Utara adalah 24.983,32 km² yang terdiri dari luas daratan 5.447,30 km² dan luas lautan 19.536,2 km². Letak wilayah Polres Halmahera Utara adalah pada posisi antara 1° 57' sampai 2° 0' LU dan 128° 17' sampai 128° 18' BT.

Jumlah penduduk kabupaten Halmahera Utara sesuai hasil sensus tahun 2002 adalah 176.225 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 89.317 jiwa dan perempuan berjumlah 86.948 jiwa. Suku-suku terasing yang terdapat di wilayah kabupaten Halmahera Utara adalah suku Togutil terdapat di daratan kecamatan Tobelo Selatan dan Kao, suku Tuguis

terdapat di daratan kecamatan Galela, Tobelo dan Kao, dan suku Moro terdapat di daratan pulau Morotai.

5) Papua

Propinsi Papua mempunyai luas wilayah 421.981 km², jumlah penduduk 2.593.274 jiwa. Secara geografis Papua terletak pada 0° 19' LS, 10° 45' LU, 141° 48' BT, 130° BB. Batas wilayah Papua adalah sebelah Utara Laut Pasifik dan Laut Halmahera, Selatan Laut Arafura dan Samudera Hindia, Barat Laut Seram dan Laut Banda, Timur wilayah negara PNG. Wilayah Papua mempunyai 27 wilayah kabupaten dan 2 kota. Ada 2 kabupaten perbatasan yang dikemukakan disini, yakni kabupaten Merauke dan Jayapura.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Buinea (PNG). Garis batas perbatasan negara dalam wilayah kabupaten Merauke sepanjang ± 462,5 km ditandai dengan 28 Tugu Batas.

Kabupaten Merauke yang letak geografisnya antara 5° LU, 9° LS, 137° BT, 141° BT, memiliki luas wilayah 117.455 km². Batas wilayah fisik daratan dan lautan wilayah merauke adalah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Jayawijaya, sebelah selatan dengan laut Arafura, sebelah Timur dengan negara PNG. Sebelah Barat dengan kabupaten Mimika. Jumlah penduduk Merauke berdasarkan hasil registrasi penduduk statistik 2004 sebanyak 435.551 jiwa terdiri dari WNI 423.735 jiwa, WNA 1.815 jiwa. Penyebaran penduduk Merauke tersebar di seluruh distrik yang terdiri dari 29 distrik.

Kota Jayapura dibatasi bagian utara Samudera Pasifik, sebelah Selatan Kabupaten Kerom, sebelah Barat kabupaten Jayapura, sebelah Timur negara PNG, letak geografis dibatasi oleh; bagian Barat 137° 27' BB, bagian Timur 1° 41' BT, bagian Utara 1° 27' LU, bagian Selatan 3° 49' LS, jarak terjauh dari Barat ke Timur 32 km, jarak terjauh dari Utara ke Selatan 29 km. Lokasi tugu-tugu perbatasan antara negara dengan RI yang berada di kota Jayapura yaitu tugu Wutung : 1° 41' 00" 00" BT dan 2° 35' 39" LS

6) Nusa Tenggara Timur

Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai luas wilayah 392.330,9 km² Luas lautan 344.981 km² Luas daratan 47.349,9 km². Jumlah penduduk 4.127.000 jiwa dengan kepadatan 87 jiwa/km². Secara geografis propinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada 8°-12° LS dan 118°-125° BT jarak utara selatan membentang sepanjang 4° dan jarak dari barat timur sepanjang 7°. Batas wilayah NTT disebelah utara berbatasan dengan laut Flores, disebelah selatan berbatasan dengan laut Hindia, disebelah barat berbatasan dengan selat Sape (propinsi NTT) dan disebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Australia.

Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan memiliki luas wilayah 2.445,57 km². Wilayah Belu dibatasi oleh selat Ombai di bagian utara, dan disebelah selatan dengan sebelah timur dengan Negara Timor Leste, serta disebelah barat dengan kab TTU. Jumlah penduduk kabupaten Belu adalah 394.935 jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten Belu tahun 2006 adalah 633/km².

Komposisi penduduk menurut kewarganegaraan WNI 394.935 jiwa dan WNA 130 jiwa. Komposisi penduduk menurut agama yang dianut Katolik 132.938 jiwa, Protestan 21.139 jiwa, Islam 4.402 jiwa, Hindu 325 jiwa, Budha 85 jiwa. Komposisi penduduk menurut pekerjaan petani 132.938 jiwa, nelayan 15.156 jiwa, pedagang 45.633 jiwa, buruh 66.691 jiwa, pegawai 29.054 jiwa lain-lain 25.005 jiwa. Komposisi penduduk menurut suku bangsa; Tetun 53,5 %, Dawan 21,1 %, Bunak 15,5 %, Kemak 8,5 %, lain-lain 1,6 %

7) Nanggroe Aceh Darussalam

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai luas wilayah 57.365,6 km², jumlah penduduk 4.085.456 jiwa, dengan rincian 2.034.136 laki-laki dan 2.051.320 perempuan (data sebelum Tsunami). Secara geografis propinsi Nanggroe Aceh terletak antara garis 2°-6° LU dan 95°-98° BT. Batas wilayah Nanggroe Aceh adalah sebelah utara selat Malaka, selatan propinsi Sumut, barat Samudra Indonesia, timur selat Malaka. Wilayah Nanggroe Aceh mempunyai 18 wilayah

kabupaten dan 3 kota.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling timur dari propinsi NAD, yang berbatasan dengan Sumatra Utara. Secara geografis, Aceh Tamiang terletak pada $04^{\circ}32'56,76''$ LU dan $97^{\circ}43'41,51''$ BT sampai $98^{\circ}14'45,41''$ BT. Secara Administratif, batas-batas wilayah kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut, disebelah utara terdapat selat Malaka, disebelah timur adalah kota Langsa, dan disebelah timur adalah propinsi Sumatra Utara.

Aceh Besar terletak pada $5,2^{\circ}$ LU - $5,8^{\circ}$ LU dan $95,0^{\circ}$ BT - $95,8^{\circ}$ BT. Secara Administratif, batas-batas wilayah kabupaten Aceh Besar adalah selat Malaka/kota Banda Aceh disebelah utara, kabupaten Aceh Jaya disebelah selatan, samudera Indonesia disebelah barat, dan disebelah timur kabupaten Pidie.

Luas wilayah kabupaten Aceh Besar adalah $2974,12 \text{ km}^2$. Aceh Besar mempunyai 22 kecamatan dan 68 pemukiman, 5 kelurahan serta 596 desa. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan selat Malaka antara lain adalah kecamatan Pulo Aceh, Peukan Bada, Krueng Barona Jaya, Baitussalam dan Masjid Raya.

Kota Sabang terletak pada $5^{\circ}46'28''$ - $5^{\circ}54'28''$ LU sampai $5^{\circ}54'28''$ LU dan $95^{\circ}13'02''$ BT - $95^{\circ}22'36''$ BT. Wilayah kota Sabang disebelah utara dibatasi oleh selat Malaka/kota Banda Aceh, disebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, dan disebelah timur dibatasi oleh selat Malaka. Luas wilayah kota sabang adalah 153 km^2 . Kota Sabang mempunyai 2 kecamatan dan 18 kelurahan serta 72 desa. Kota Sabang mempunyai 5 pulau-pulau kecil. Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2004 adalah sebesar 28.657 jiwa. Dari jumlah tersebut, 13.962 adalah perempuan dan 14.695 laki-laki. Dari sekian jumlah penduduk kota Sabang, jumlah penganggurannya adalah 2151 jiwa, dengan rincian, kecamatan suka karya sebanyak 1799 jiwa dan kecamatan suka jaya sebanyak 352 jiwa.

8) Kepulauan Riau

Propinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah $11.195,52 \text{ km}^2$, jumlah

penduduk 1.200.000 juta jiwa. Secara geografis propinsi Kepulauan Riau terletak pada 0° - $0,48^{\circ}$ LS, 1° . 48° - 0° LU, 104° - 108° BT 0° - 0° BB. Batas wilayah Kepulauan Riau adalah sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan dengan propinsi Jambi, sebelah barat propinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sebelah timur dengan propinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten/kota perbatasan di kepulauan Riau yang dijadikan sasaran penelitian ini adalah Bareleng. Pulau Batam terletak pada posisi lintang $0^{\circ},55'$ LU - $1^{\circ},15'$ LU dan $103^{\circ},45'$ BT - $104^{\circ},10'$ BT. Sedangkan pulau Rempang dan Galang terletak pada $0^{\circ},10'$ LU - $0^{\circ},55'$ LU dan $103^{\circ},60'$ BT - $104^{\circ},50'$ BT.

Berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kota Batam, kota Batam dimekarkan menjadi kecamatan yang meliputi 51 desa/kelurahan yaitu kecamatan Batu Ampar 8 kelurahan, kecamatan Nongsa 1 desa dan kecamatan Galang 7 desa, kecamatan Sungai Beduk 4 kelurahan, kecamatan Bulang 4 desa/2 kelurahan, kecamatan Belakang Padang 4 desa/1 kelurahan, kecamatan Sekupang 8 kelurahan, kecamatan Lubuk Baja 5 kelurahan.

Batas wilayah Poltabes Balerang disebelah selatan perbatasan kecamatan Moro kabupaten Karimun, disebelah utara perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, disebelah barat berbatasan dengan kecamatan Karimun kabupaten karimun, disebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bintan utara dan Bintan selatan kabupaten Bintan propinsi kepulauan Riau. Jumlah penduduk Bareleng berjumlah 685.787 jiwa. Jumlah penduduk Batam mengalami penurunan mencapai 0,24 %, hal ini disebabkan diberlakukannya peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2001 tentang penyelenggaraan penduduk dalam daerah kota batam.

Luas wilayah Balerang $3.990,00 \text{ km}^2$ meliputi 400 buah pulau, 329 buah diantaranya telah bernama, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pulau Batam dengan luas 415 km^2 (41.500) = 67 % luas Singapore yang terdiri atas wilayah Sekupang, Batu Ampar, Pantai Timur, Batam Center dan Rempang/Galang.

b) Pulau Rempang terletak 2,5 km di sebelah Tenggara pulau Batam dengan luas 165,83 km² (16.583 Ha) = 27 % luas Singapore.

c) Pulau Galang terletak 350 M disebelah Tenggara pulau Rempang luas 80 km² (8.000 Ha) = 13 % luas Singapore.

d) Pulau Galang Baru terletak 180 M disebelah selatan pulau Galang, dengan luas 32 km² (3.200 Ha)

b. Variabel (internal) yang berpengaruh dalam pemberian pelayanan pos perbatasan

1) Sumber daya manusia

No.	Propinsi	Pos Perbatasan	Jml personil	Ket kualifikasi
1	Kalimantan Barat	- Pos batas Arus dan Temajuk Sambas	9 orang	Bintara non dikjur
		- Jagoi babang bengkayang nagabayan	9 orang	Sda
		- Pos sintang	6 orang	Sda
		- Pospol Badau dan puring kencana kapuas hulu	10 orang	Sda
			10 orang	Sda
2	Kalimantan Timur Kab. Nunukan	1. Sungai nyamuk	3 orang	Sda
		2. Ajikung	4 orang	Sda
		P.S ebatik	6 orang	Sda
	Kab. Malinau	1. Long Nawang	6 orang	Sda
		2. Sungai Batuah	6 orang	Sda
		3. Long Ampung	6 orang	Sda
		4. Sungai Boah	6 orang	Sda
	3	Riau Kota Batam	1. Belakang padang	10 orang
2. KP3 Batam (5pos)			33 orang	Sda
3. Tanjung uma			-	Sda
4. Galang Batu			-	Sda
Kab. Karimun		1. Pulau Baru	1 orang	Sda
		2. Pulau Panjang	3 orang	Sda
4	Maluku Utara	Posek Morut	7 orang	Sda
		Polsek Morsel	8 orang	Sda
		Polsek Morselbar	5 orang	Sda
		Polsek Galela	10 orang	Sda
		Polsek Laloda	6 orang	Sda
5	Aceh	1. Pos Itam	3 orang	Sda
		2. Pos Dayaseunara	3 orang	Sda
		3. Aceh utara, Aceh besar, Aceh Tamiang,		
6	NTT	- Kab. Belu	Tidak ada	Sda
		- Ratu Ndao	Wini Napan Meo maffu timur	6 orang 5 orang 8 orang
7	Papua	Paspal Sota	10 orang	Sda
		Wutung	11 orang	Sda
		Yabanda	6 orang	Sda
8	Sulawesi Utara	Nusa Tabuka	3 orang	Sda
		Kawaluso	3 orang	Sda

2) Kondisi sarana dan prasarana pospol perbatasan

No	Propinsi	Nama Pos Perbatasan	Luas/Type Pos	Kondisi Sarana Prasarana							
				Alat kantor		Alat transportasi		Aikom		Senpi+amunisi	
				standar	Tdk stdr	memiliki	Tdk memiliki	Memadai	Tdk memadai	Memadai	Tdk memadai
1	Kalbar - Kab. Sambas - Bengkayang - Sintang - Kapuas Hulu - Sanggau	- Pos Aruk - Pos Temajuk - Pos Jagoi babang - Pos Nanga bayan - Pos Badau - Pos Puring kencana - Entikong	- T46 (P)	-	/	2 (motor)	Rusak	-	/	/	-
			- T46 (P)	-	/	2 (motor)	Rusak	-	/	/	-
			- T Stdr (TB)	-	/	-	/	-	/	-	/
			- T Stdr (TS)	-	/	-	/	-	/	-	/
			- T46 (P)	-	/	2 (motor)	Rusak	-	/	/	-
			- T46 (P)	-	/	2 (motor)	Rusak	/	/	/	-
2	Kaltim - Nunukan - Malino	- S. nyamuk - Aji kuning P. Sebatik - Setabu - Long Nawang - S. Betooh - Long apung	- T stdr (TS)	-	/	160 pk (1)	-	-	/	-	/
			- Stdr (P)	-	/	-	-	/	-	/	
			- B stdr (TS)	-	/	1 motor	-	-	-	-	/
			- B stdr (TS)	-	/	-	-	-	-	-	/
			- B Stdr (TS)	-	/	-	-	-	-	-	/
			- B stdr (BS)	-	/	1 motor	-	-	-	-	-
3	Riau - Kota Batam - Karimun	- Sek Belakang Padang - Sek KP3 Batam (5 pos) - Pos Tj. Uma	- Stdr (s)	/	-	Speed boat	-	Motorola	-	-	/
			- B Stdr (BS)	-	/	Speed boat	-	Motorola	-	-	/
			- Stdr (BS)	-	/	1 motor	/	-	Icom	-	/
			-	-	/	1 motor	-	-	/	-	/
4	Sulut - Sangihe	- Nusa tabukan - Kawaluso	- Stdr (BS)	-	/	-	-	-	-	-	
			- B ada Bangunan	-	/	-	-	-	-	-	
5	Malut - Halut	- Polsek Morut - Polsek Morsel - Polsek Morselbar - Polsek Galela - Polsek Laloda	Tidak memiliki pos perbatasan	-	/	R2	-	-	/	-	/
			-	-	/	Speedboat	-	-	/	-	/
			-	-	/	R2	-	-	/	-	/
			-	-	/	R2	-	-	/	-	/
			-	-	/	R2	-	-	/	-	/
6	Aceh - Sabang - Aceh besar	- Anji itam - Daya seunara - Pos perbatasan hancur akibat Tsunami - Aceh Timur, Utara, dan Aceh Tamiang tdk memiliki Pos perbatasan	- B stdr	-	/	-	/	-	/	-	/
			- B stdr	-	/	-	/	-	/	-	/
			- Hancur akibat Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Tidak/belum memiliki pos	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NTT - Belu - Rotendao	1. Matoain 2. Turiskain 3. Raihat 1. Wini 2. Napan 3. Meo maffu timur	- Stdr (SD)	-	/	R2	-	/	-	-	/
			- Stdr (SD)	-	/	R2	-	/	-	-	/
			- Stdr (SD)	-	/	R2	-	/	-	-	/
			- B stdr (SP)	-	/	R2	/	/	-	-	/
			- Stdr (SP)	-	/	R2	-	/	-	-	/
			- B Stdr (SP)	-	/	R2	-	/	-	-	/
8	Papua - Merauke - Jayapura - Ketkom	- Pos Sota - Pos Wutung - Pos Yobanda	- Stdr (SP)	-	/	-	/	-	/	-	/
			- Stdr (SP)	-	/	-	/	-	/	-	/
			- Stdr (BS)	-	/	-	/	-	/	-	/

c. Koordinasi Lintas Sektoral dalam pengamanan perbatasan

1) Kalimantan Barat

Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus di wilayah perbatasan sudah berjalan bersama dengan Pemda setempat, Bea Cukai, Imigrasi, TNI AD, Dinas kehutanan, Perhubungan. Koordinasi dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri dalam penanganan kasus bersama di wilayah perbatasan dilakukan bersama dengan Bea Cukai, imigrasi, TNI AD. Namun koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait tersebut hanya jika diperlukan koordinasi. Di samping itu juga terdapat Pos Ton Libas (Lintas Batas) TNI AD serta pos keimigrasian dan Bea Cukai. Untuk bangunan Border resmi sudah selesai dibangun, tinggal menunggu operasionalnya.

2) Kalimantan Timur

Dilihat dari jumlah instansi non Polri di daerah perbatasan Kalimantan Timur, maka KP3 Sungai Nyamuk merupakan Pospol perbatasan yang memiliki aktivitas pelayanan yang paling besar. Aktivitas pelayanan Polri keimigrasian, Bea Cukai dan kesyahbandaran. Pospol di KP3 Sungai Nyamuk merupakan salah satu tempat melakukan lalu-lintas barang dan manusia.

Tingkat koordinasi yang dilakukan Pospol di daerah perbatasan di Kalimantan Timur pada umumnya sebatas melakukan koordinasi dengan instansi Non-Polri. Namun, ada juga Pospol yang belum atau tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi manapun. Pospol seperti ini terdapat di wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman penduduk di daerah pedalaman Kalimantan Barat dimana potensi illegal logging sangat besar. Padahal perbatasan yang paling sering melakukan koordinasi adalah Pospol yang berada di jalur mobilitas penduduk atau pintu masuk ke negara tetangga.

3) Sulawesi Utara

Koordinasi dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri dalam penanganannya kasus bersama di wilayah perbatasan dilakukan bersama dengan

TNI AD sedangkan instansi lainnya seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Departemen lainnya belum ada di pulau Tinakareng maupun pulau Kawaluso koordinasi yang dilakukan dengan TNI-AD tersebut hanya jika diperlukan ataupun ada suatu kasus.

4) Maluku Utara

Maluku kekuatan yang tergelar di wilayah kabupaten Halmahera Utara baik organik maupun BKO saat ini meliputi kompi C735 Banau. Kodim 1508 Penugasan Tobelo, Lanud 7 Morotai di kecamatan Morotai selatan, Satgas Yon Armed 10 dan Satgas Brimobda Bali 2 SST.

5) Papua

Tingkat koordinasi yang dilakukan Pospol di daerah perbatasan di Keerom pada umumnya sebatas melakukan koordinasi dengan instansi Non-Polri. Namun ada juga Pospol yang belum atau tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi manapun. Pospol seperti ini terdapat di wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman penduduk di daerah pedalaman Keerom dimana potensi illegal logging sangat besar. Pospol perbatasan yang paling sering melakukan koordinasi adalah Pospol yang berada di jalur mobilitas penduduk atau pintu masuk ke Negara tetangga.

6) Nusa Tenggara Timur

Pelayanan kepolisian di perbatasan kabupaten Belu cenderung berpusat di Pospol Motoangin. Aktivitas pelayanan kepolisian dengan melakukan koordinasi terjadi dengan instansi imigrasi dan beacukai. Sedangkan di Turis Kain dan Raihat lebih banyak melakukan patroli dengan TNI AD.

7) Nanggroe Aceh Darussalam

Koordinasi dengan instansi terkait terutama terkait dengan penanganan kasus pelanggaran nelayan NAD yang memasuki wilayah laut negara asing. Koordinasi itu juga dilakukan terkait masuknya barang-barang ilegal terutama senjata dari luar, serta eksodus warga NAD terkait konflik senjata pada masa lalu.

8) Kabupaten Riau

Koordinasi dilakukan tidak secara periodik. Kasus kamtibmas di perbatasan

yang ditangani Polres Karimun adalah nihil. Polres Karimun tidak memiliki Pos-pol perbatasan. Oleh sebab itu, tidak ada petugas Polri yang berpatroli di daerah perbatasan. Pelanggaran Kamtibmas di wilayah ini yang sering terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh warga ne-

gara asing. Koordinasi dengan instansi terkait yaitu Pemda, Bea Cukai, Imigrasi, TNI, Kehutanan, Perhubungan, Karantina dll dalam penanganan kasus di wilayah perbatasan sudah berjalan baik, meliputi kegiatan patroli pengawasan orang asing dll.

Data kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat tahun 2004 - 2005

NO	Jenis Kejahatan	Tahun Anggaran	
		2004	2005
1	Illegal logging	16	34
2	Penyelundupan gula	6	10
3	Penyelundupan mobil	2	3
4	Penyelundupan keramik	-	1
5	Pengeroyokan	1	-
6	Tapal batas	-	1
7	Penculikan	1	-
8	Penjualan anak dan wanita	-	-
9	Narkoba	-	1
10	Penembakan	-	1
11	Keimigrasian	1	1
12	Pembakaran	-	1
13	Senpi handak	-	1
14	Pencurian dengan pemberatan	-	1
		27	54

Data kriminalitas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat Kurun waktu tahun 2003 - 2004

Kesatuan (Polres)	Kurun waktu									
	2003					2004				
	CT	CCL	%	CR	CCLK	CT	CCL	%	CR	CCLK
Sambas	690	425	61,50	144,59	12 ^o 31'12"	370	224	60,54	78,07	23 ^o 21'00"
Bengkayang	21	12	57,14	14,56	41 ^o 25'12"	106	61	57,54	73,49	81 ^o 30'00"
Sanggau	181	131	72,37	37,29	47 ^o 43'48"	158	109	68,98	32,55	54 ^o 40'48"
Sintang	295	166	56,27	70,48	29 ^o 16'48"	320	83	25,93	76,46	27 ^o 00'00"
Kapuas hulu	94	69	73,40	52,13	91 ^o 16'48"	117	63	53,64	64,89	73 ^o 50'24"

Data kriminalitas menonjol di wilayah perbatasan Kalimantan Barat kurun waktu 2004 2005

No	Kasus menonjol	Kurun waktu		Ket
		2004	2005	
1	Illegal logging	233 kasus	84 kasus	
2	Gula illegal	14 kasus	12 kasus	
3	Penculikan	1 kasus	-	
4	Tapal batas		1 kasus	
5	Penjuala	16 kasus	-	

Data kriminalitas Kepulauan Riau Kondisi kriminalitas 5 tahun terakhir

No	Tahun	JTPT	JPTP	Trend	
				JTPT	JPTP
1	2001	1362	725	627	54 %
2	2002	1601	777	824	49 %
3	2003	2111	1132	979	54 %
4	2004	2236	1372	864	61 %
5	2005	2833	1733	2200	61 %

4. Efektifitas Pelayanan Kepolisian di Perbatasan

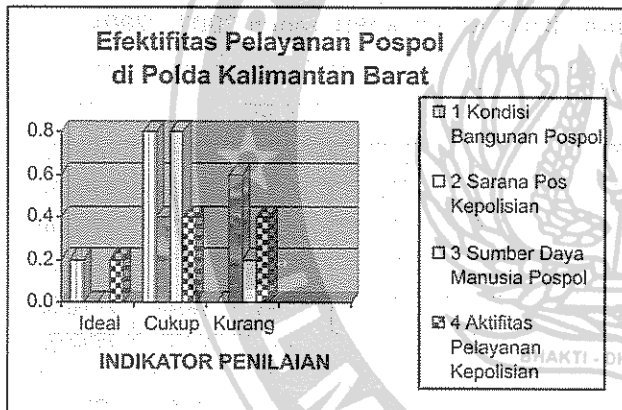
Analisis efektifitas pelayanan pos kepolisian di wilayah perbatasan antar Negara dilakukan dengan melakukan kategorisasi keempat indikator pelayanan pos kepolisian, yakni (1) kurang; (2) cukup, dan (3) ideal. Kategori kurang, cukup dan ideal untuk indikator bangunan fisik dan prasarana pospol dinilai dari ada/tidaknya bangunan pospol; ada/tidaknya prasarana ruang bangunan pos kepolisian. Indikator sarana pospol dilihat dari ada/tidaknya; jumlah, jenis dari sarana komunikasi, sarana transportasi. Indikator sumberdaya manusia dilihat tingkat kualitas dan kuantitas SDM polri di pos perbatasan, dan tingkat aktivitas pelayanan kepolisian di lihat dari tingkat koordinasi dan pelayanan pos kepolisian yang diberikan.

A. Wilayah Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas pelayanan pos kepolisian di wilayah perbatasan antar Negara Polda Kalimantan Barat hasil sebagai berikut :

Tabel 1

Efektifitas Pelayanan Pospol Perbatasan di Kalimantan Barat



Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilai aktivitas pelayanan pospol perbatasan di Polda Kalimantan Barat dapat kesimpulan, sebagai berikut:

- Kondisi bangunan dan sumberdaya manusia pospol termasuk kategori cukup.
- Sarana pospol dan aktivitas pelayanan pospol perbatasan termasuk kategori kurang.
- Aktivitas pelayanan pospol perbatasan kategori kurang dan cukup.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan tingkat efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Polda Kalimantan Barat berada pada kategori cukup.

B. Kalimantan Timur

Dibawah ini merupakan hasil penelitian efektifitas pelayanan pos kepolisian di wilayah perbatasan Polda Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Efektifitas Pelayanan Pospol Perbatasan di Kalimantan Timur

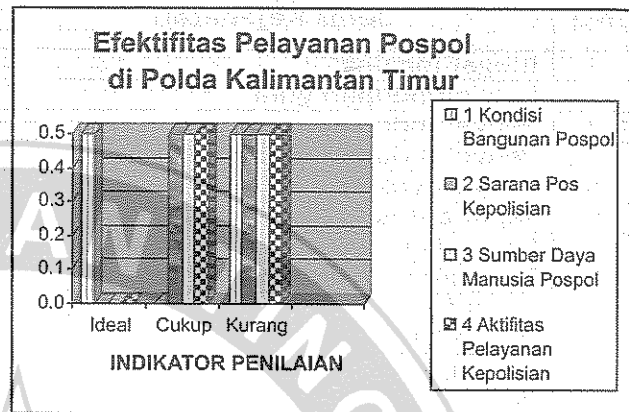


Table 2 di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilaian efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Polda di Kalimantan Timur dapat diketahui, sebagai berikut;

- Kondisi bangunan pospol termasuk kategori ideal.
- Kondisi sarana pospol, sumberdaya manusia dan aktivitas pelayanan kepolisian termasuk kategori antara kurang dan cukup.

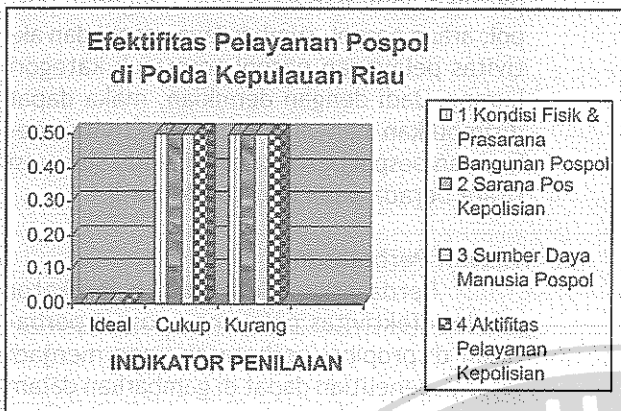
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pelayanan pospol perbatasan di polda Kalimantan Timur berada pada kategori kurang dan cukup.

B. Kepulauan Riau

Hasil penelitian mengenai efektifitas pelayanan pos kepolisian di wilayah perbatasan antara Negara kepulauan Riau memiliki hasil seperti terlihat pada Table 3 di bawah ini menunjukkan bahwa dari 4 indikator nilai efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Polda Kepulauan Riau dapat di ketahui, bahwa kondisi bangunan pospol, sarana pospol, sumber daya pospol dan aktifitas pelayanan pospol termasuk kategori antara cukup dan kurang.

Jadi dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pelayanan pospol perbatasan di polda kepulauan Riau berada pada kategori kurang dan cukup.

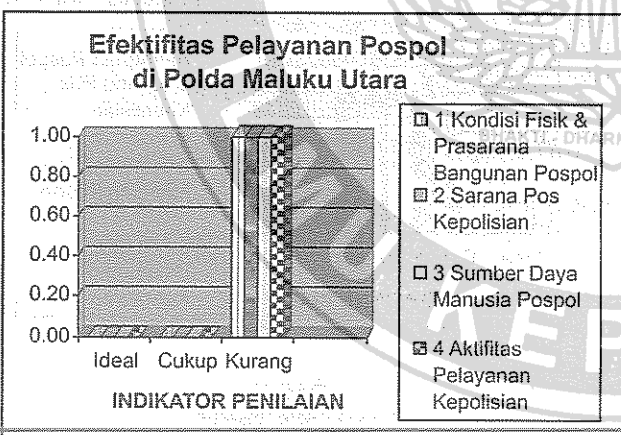
Tabel 3
Efektifitas Pelayanan Pospol Perbatasan
di Kepulauan Riau



D. Maluku Utara

Tabel di bawah ini merupakan hasil penelitian mengenai efektifitas pelayanan pospol perbatasan di wilayah Poda Maluku Utara dapat di ketahui, bahwa kondisi bangunan pospol, sarana pospol, sumber daya pospol dan aktifitas pelayanan pospol termasuk kategori kurang. Jadi dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Poda Maluku Utara berada pada kategori kurang.

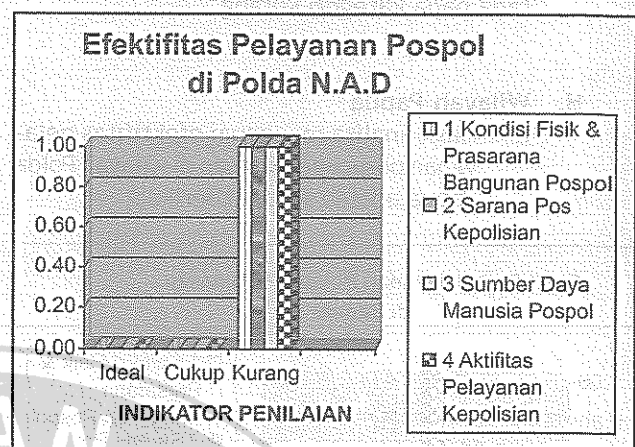
Tabel 4
Efektifitas Pelayanan Pospol Perbatasan
di Maluku Utara



E. Nanggroe Aceh Darussalam

Efektifitas pelayanan pospol perbatasan di wilayah Poda Nanggroe Aceh Darussalam terdapat dalam table analisa di bawah ini:

Tabel 5
Efektifitas Pelayanan Pospol Perbatasan
di Nanggroe Aceh Darussalam



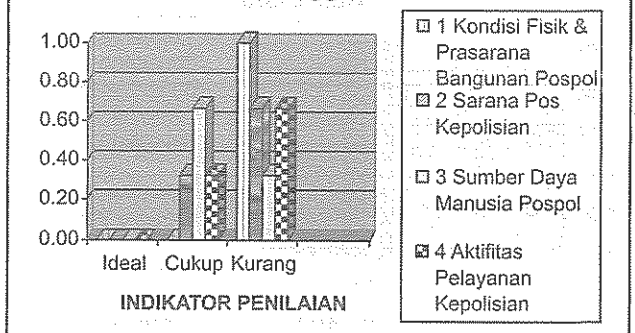
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilai efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Poda Nanggroe Aceh Darussalam dapat di ketahui, bahwa kondisi bangunan pospol, sarana pospol, sumber daya pospol dan aktifitas pelayanan pospol termasuk kategori kurang. Jadi dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pospol perbatasan di Poda Nanggroe Aceh Darussalam berada pada kategori kurang.

F. Nusa Tenggara Timur

Tabel di bawah ini merupakan hasil analisa efektifitas pelayanan pospol perbatasan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari tabel 6 di bawah ini menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilai efektifitas pelayanan pospol perbatasan di Poda Nusa Tenggara Timur dapat di ketahui, sebagai berikut:

- Kondisi fisik dan prasarana bangunan pospol dan sarana pospol dan aktifitas pelayanan kepolisian termasuk kategori kurang.
- Kondisi sumber daya manusia pospol termasuk kategori cukup.

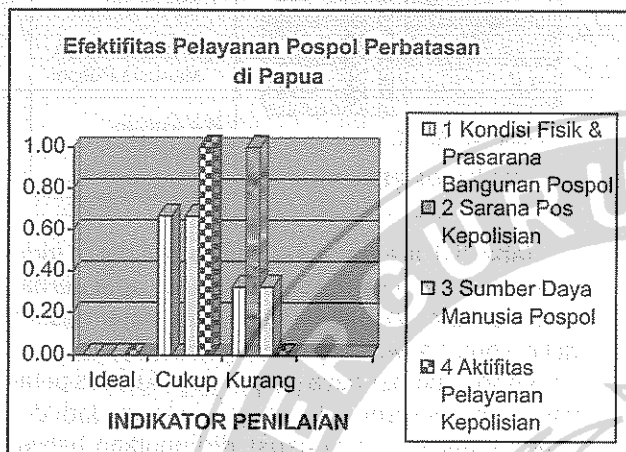
**Efektifitas Pelayanan Pospol
di Poda Nusa Tenggara Timur**



Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Polda NTT berada pada kategori kurang.

H. Wilayah Papua

1. Hasil analisa mengenai efektifitas pelayanan paspol perbatasan di wilayah Polda Papua adalah sebagai berikut:



Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilai efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Papua dapat diketahui, sebagai berikut:

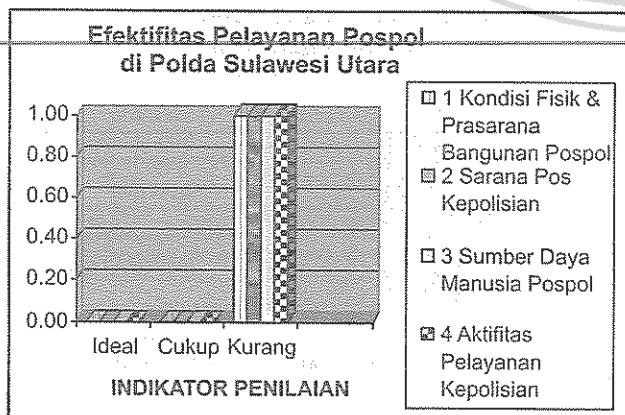
a. Kondisi sarana paspol perbatasan terdapat termasuk kategori kurang.

b. Kondisi sumberdaya manusia, kondisi fisik dan bangunan pospol dan pelayanan paspol termasuk kategori antara cukup.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Polda Papua berada pada kategori cukup dan kurang.

I. Wilayah Sulawesi Utara

Efektifitas pelayanan paspol perbatasan di wilayah Polda Sulawesi Utara terdapat dalam analisa di bawah ini:



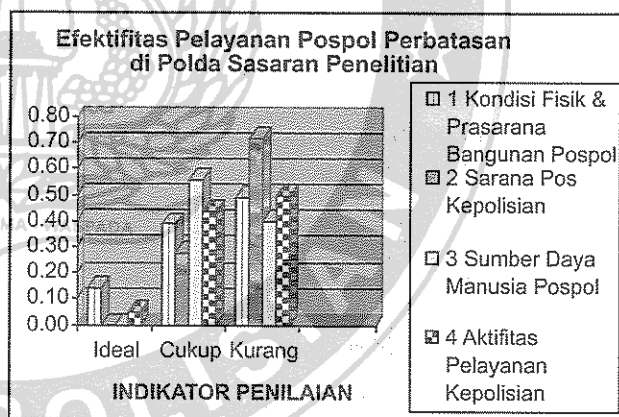
Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator penilai efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Polda Sulawesi Utara dapat diketahui, bahwa kondisi bangunan pospol, sarana paspol, sumberdaya paspol dan aktivitas pelayanan paspol termasuk kategori kurang. Jadi dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Polda Sulawesi Utara berada pada kategori kurang.

J. Wilayah Perbatasan

Berdasarkan perhitungan indikator penilai efektifitas pelayanan paspol perbatasan di propinsi perbatasan yang menjadi sasaran penelitian dapat di gambarkan dalam table 9. Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa dari 4 indikator penilai efektifitas pelayanan paspol perbatasan di Papua dapat diketahui, sebagai berikut:

a. Sarana paspol perbatasan di ke 8 Polda sasaran penelitian termasuk kategori kurang.

b. Kondisi sumberdaya manusia, kondisi fisik dan bangunan pospol dan aktivitas pelayanan paspol di 8 Polda sasaran penelitian termasuk kategori antara kategori kurang dan sedang.



BAB V ANALISIS SWOT

1. Ancaman Lingkungan di Daerah Perbatasan

Ancaman adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan tugas-tugas kepolisian di perbatasan. Kecenderungan karakteristik gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan yang terjadi adalah tantangan tugas polri yang harus dihadapi sehingga tercipta kondisi kamtibmas di perbatasan yang mantap.

Hasil penelitian di propinsi-propinsi perbatasan

san memperlihatkan sebagai berikut:

- Kerawanan terjadinya illegal logging, penyelundupan (orang, kendaraan, gula, pakaian bekas) dan TKI illegal di wilayah Kalimantan Barat.
- Di wilayah Kalimantan Timur rawan terjadi pergeseran pokok batas wilayah Indonesia - Malaysia, pencurian SDA di perbatasan, pelanggaran keimigrasian, illegal logging, illegal fishing, dan penyelundupan manusia.
- Di wilayah Sulawesi Utara rawan terjadinya illegal fishing, TKI illegal, penyelundupan barang, pelanggaran keimigrasian.
- Kasus illegal fishing, perampokan, penyelundupan barang, khususnya senjata maupun barang-barang kebutuhan lainnya, human trafficking, pelanggaran pelintas batas perairan, termasuk penyelundupan barang-barang dari dan ke Negara tetangga masih mewarnai situasi wilayah perbatasan di Maluku Utara.
- Penduduk asli Papua mudah dipengaruhi kegiatan separatis yang dikemas dalam kegiatan adapt, keagamaan maupun kegiatan social-budaya lainnya merupakan hal yang menonjol di wilayah Papua.
- Kerawanan terjadinya kejahatan Transnasional di kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan dengan Timor Leste seperti *people small trafficking* dan penyelundupan.
- Gangguan kamtibmas yang menonjol pada daerah perbatasan di wilayah NAD adalah narkoba, illegal fishing, penyelundupan kendaraan bermotor, senjata yang didatangkan dari luar negeri dan perompakan dan manusia perahu (pengungsi Vietnam).
- Kebutuhan sembilan bahan pokok di wilayah kota besar Babelang dan daerah perbatasan lainnya yang di datangkan dari negara tetangga seperti Malaysia maupun Singapura menjadikan perekonomian rakyat yang tergantung dengan perekonomian tetangga. Hal ini merupakan potensi kerawanan terjadinya penyelundupan barang dan manusia yang melewati pelabuhan atau jalan tikus

terjadi tumpang tindih antara instansi pemerintah lain, perubahan teknologi dan tumpang tindih peraturan.

3. Kekuatan Polri di Daerah Perbatasan

Kekuatan adalah sumberdaya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki personil Polri di perbatasan untuk melayani tugas-tugas Polri sebagaimana diatur pada pasal 13 dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara tentang tugas polri, dan pasal 10 dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/XII/2004 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP).

4. Kelemahan Polri di Daerah Perbatasan

Berdasarkan perhitungan dari indikator penilai efektivitas pelayanan pospol perbatasan di propinsi-propinsi perbatasan sebagaimana dipaparkan pada bab 4, maka dapat diketahui adanya kelemahan-kelemahan pelayanan Polri di perbatasan, sebagai berikut:

- a. Sarana pospol perbatasan, seperti alat komunikasi, sarana transportasi di propinsi perbatasan dapat dikatakan termasuk kategori kurang.
- b. Kondisi sumberdaya manusia, kondisi fisik dan bangunan pospol dan aktifitas pelayanan pospol termasuk kategori antara cukup dan rendah.

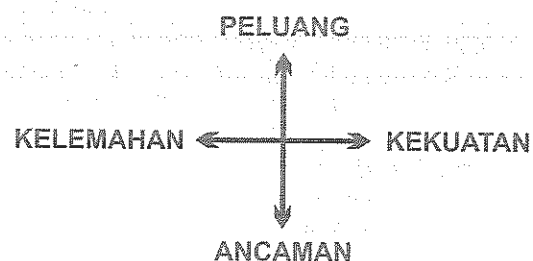
Dengan demikian maka dapat disimpulkan terdapat keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan dan keabilitas yang cukup serius yang menghambat kinerja efektif pelayanan Polri di perbatasan.

Analisa SWOT dapat digunakan dengan cara untuk membantu analisis strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan Polri diperbatasan untuk membantu analisis strategi dapat dilakukan dengan analisis SWOT (gambar 1). Pertama, peluang dan ancaman dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan. Kedua, melakukan melakukan identifikasi satu dari empat pola yang mencocokkan situasi intern dan eksteren.

2. Peluang Tugas-Tugas Polri yang Dapat Dilakukan di Daerah Perbatasan

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan bagi Polri untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di wilayah perbatasan. Kecenderungan dan karakteristik gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah adalah sumber peluang dari Polri untuk menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan yang ada, koordinasi, tidak

Gambar 1 Diagram Analisis SWOT



Dapat ditentukan berdasarkan dari analisa perbandingan antara peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman, ada (4 empat) strategi yang harus dilakukan Polri di wilayah perbatasan. Pola 1 adalah yang sifatnya agresif, yakni strategi yang berorientasi pada pemanfaatan situasi yang menguntungkan agar terjadi pelayanan Polri yang optimal.

Pola 2 adalah strategi di verifikasi, yakni strategi yang memanfaatkan kekuatan Polri yang ada untuk melakukan tugas-tugas Polri mengalami gangguan kamtibmas di wilayah persatuan yang spesifik.

Pola 3 adalah berbenah diri. Dalam konteks ini Polri menghadapi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan yang spesifik namun di hadapkan pada kendala lemahnya sarana dan prasarana pelayanan Polri, termasuk kondisi paspol. Oleh sebab itu, strategi adalah melakukan perbaikan kelemahan yang di hadapi Polri di pospol wilayah perbatasan.

Pola 4 adalah situasi yang tidak menguntungkan. Polri di wilayah perbatasan menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berat, akan tetapi di hadapkan masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, misalnya kewenangan penegakan hukum di perairan, keimigrasian, dan sebagainya.

Berdasarkan dari analisis SWOT di atas maka pilihan strategi pola 3 perlu mendapat perhatian yakni strategi berbenah diri. Rekomendasi yang diusulkan adalah mengatasi kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala kinerja Polisi di wilayah perbatasan.

Tim Peneliti :

Drs. Ismu Haryomo, SH, MM., Soeroso, SH., Rondiah, BSc., Wadi, SH., Drs. Suradji, Drs. Mbyong, Drs. Ary Wahyono, MSc., Ir. A.G. Adi Permana, Bambang Harnoko, SSI, Fachrurrozi, SAg., Suyatini, Ida Ayu Rupini.

TIP'S

MUSIK UNTUK KESEIMBANGAN OTAK

Bila pernah menonton film Prancis berjudul *Les Choristes* (2004) yang berkisah tentang kehidupan di sekolah khusus anak nakal, sekali lagi kita diingatkan betapa keindahan musik dapat mengalahkan kekerasan. Dalam film yang mendapat beragam penghargaan internasional bergengsi itu diceritakan bagaimana bocah-bocah nakal itu akhirnya menjadi "jinak" setelah diajari menyanyi.

Banyak sudah *Penelitian* yang membuktikan bahwa musik memberikan banyak manfaat kepada manusia. Antara lain *merangsang pikiran, memperbaiki konsentrasi dan ingatan, meningkatkan aspek kognitif, dan membangun kecerdasan emosional, Musik juga dapat menyeimbangkan aspek intelektual dan emosional.*

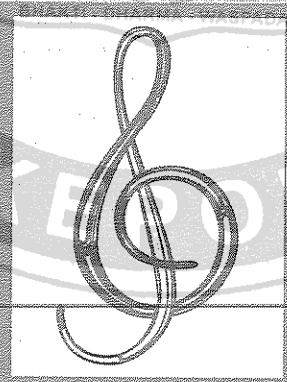
Dengan demikian, tindakan berlebihan bila musik dikatakan sebagai pendidikan humanis. Itulah sebabnya siswa yang terbiasa mendapatkan *pendidikan musik* akan tumbuh menjadi manusia yang *berpikiran logis, cerdas, kreatif, mampu mengambil keputusan, serta mempunyai empati.*

Sayangnya pendidikan formal di Indonesia kurang menekankan keseimbangan antara aspek inte-

lektual dan emosi karena hanya menekankan perkembangan intelektual. Buktinya tawuran pelajar sering terjadi dan siswa SD seringkali terbebani dengan padatnya mata pelajaran sehingga sekolah justru mengurangi keceriaan masa kecil anak.

Berkaca pada negara maju, siswa SD di Amerika Serikat, misalnya, mendapatkan pelajaran musik selama 80 menit setiap minggunya, sehingga mereka sudah dapat membuat koor dengan aransemen-aransemen sulit dan memainkan beberapa instrumen. Di tingkat SLTP pelajaran musik diperdalam sesuai minat masing-masing. Pendidikan musik di SMU ditekankan untuk menyusun program-program musik. Sedangkan di Inggris, anak usia TK yang berkemampuan membaca di bawah rata-rata ternyata dapat mengejar ketinggalannya lebih cepat sesudah mengikuti pelajaran musik tambahan. Universitas-universitas di Jepang pun banyak yang mempunyai orkes simfoni sebagai kelanjutan dari pelajaran musik yang diterima di SD, SLTP, dan SMU.

Tidak hanya menyeimbangkan *otak kiri dan kanan*, tapi efek musik juga dapat *menyehatkan jiwa*, sebagai pendekatan belajar (terutama berhitung), dan mengajarkan sopan santun, sehingga siswa dapat menyalurkan emosinya secara positif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Dengan begitu, niscaya *Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia* dapat ditingkatkan.**





Dirgahayu
Republik Indonesia ke-62

Segenap Jajaran dan Staf
BIRO LITBANG POLRI